

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menginginkan manusia menyiapkan kehidupan terbaiknya agar dapat menikmatinya, memanfaatkan segala yang ada sebaik mungkin hingga mendapat keberkahan, kebahagiaan, juga rasa syukur yang membuat mereka beribadah lebih khusyu kepada Allah swt. Hal ini menjadi sebuah tujuan dari wajibnya zakat demi keberlangsungan hidup umat muslim.¹ Pada dasarnya zakat merupakan tatanan sosial dalam islam yang berguna untuk memperkecil kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, sebab konsepnya harta orang kaya tidak sepenuhnya miliknya melainkan ada hak milik orang lain yang harus diberikan sesuai ketentuan syariah pada harta yang dikuasainya.²

Kedudukan zakat sangatlah penting bagi umat muslim mengingat zakat sebagai rukun Islam yang ketiga. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah saw. bersabda, *“Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan ramadhan.”* Oleh karena itu, zakat hukumnya adalah wajib bagi umat muslim yang memenuhi syarat wajib zakat, sebab zakat menjadi unsur tegaknya syariat Islam juga dianggap sebagai amal sosial yang berguna untuk membangun hubungan baik dalam bermasyarakat.³

Adapun syarat mengenai kekayaan yang wajib dizakati **pertama**, harta yang dizakati adalah harta yang didapat secara halal dan baik. **Kedua**, harta yang dizakati adalah harta yang dapat atau berpeluang untuk berkembang. **Ketiga**, harta yang dizakati telah mencapai nishab, jika tidak atau belum mencapai nishab maka tidak diwajibkan untuk zakat. Nishab berarti batasan suatu harta apakah wajib dizakati

¹ Yusuf Qaradhawi, *“Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan”*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2005, h.27-28.

² Yani Rohmayani, *“Zakat Profesi dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat”*, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Vol.1, No.1, 2018, h.21.

³ Kinoysan (Ari Wulandari), *“Love Banget Sama Zakat”*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013, h.19-23.

atau tidak. **Keempat**, harta yang dizakati telah mencapai haul atau dimiliki setahun penuh. Namun syarat tersebut berlaku untuk zakat harta simpanan, perniagaan, dan binatang ternak. Sedangkan barang temuan / rikaz dan hasil pertanian tidak harus mencapai haul. **Kelima**, harta yang dizakati telah diambil lebih dahulu untuk kebutuhan pokok (kebutuhan minimal seseorang serta keluarga yang menjadi tanggungannya). **Keenam**, harta yang dizakati harus bebas dari utang. Setelah mendahulukan pembayaran utang kemudian hartanya masih mencapai nishab maka wajib zakat, dan sebaliknya. **Ketujuh**, harta dimiliki seseorang secara penuh (tidak ada milik orang lain dalam harta tersebut).⁴

Zakat sendiri terbagi atas beberapa macam, salah satunya adalah zakat pendapatan / penghasilan / profesi. Penghasilan atau pendapatan yang didapat dari suatu profesi yang dijalankan harus dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab.⁵ Dalam sejarah Islam dari masa Rasulullah saw. hingga abad ke-20 akhir tahun 60-an zakat profesi belum pernah ada, namun kemudian muncul penggagas zakat profesi yakni Syeikh Yusuf Qardhawi dengan kitabnya *Fiqh Az Zakah* yang terbit pertama kali pada tahun 1969. Di Indonesia sendiri kajian serta praktik zakat profesi ada sejak akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan oleh Didin Hafidhudin ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Fikih Zakat pada tahun 1999. Sejak itulah di Indonesia zakat profesi mulai diterapkan oleh lembaga pengelola zakat yakni BAZ milik pemerintah baik BAZDA, BAZNAS atau LAZ milik swasta.⁶

Badan Amil Zakat yang berkedudukan sebagai wakil *muzaki* harus memenuhi kriteria sebagai orang yang paham hukum Islam sehingga tahu seluk beluk zakat dan siapa saja yang termasuk *mustahiq*, kemudian pengurus haruslah orang yang amanah juga tidak diperbolehkan mengembangkan harta zakat, sebab yang harus dilakukan BAZ adalah menyalurkan kepada yang berhak menerimanya.⁷ Zakat profesi diberikan kepada 8 asnaf sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, hal

⁴ Rahmi Fitriani, "Ayo Mengenal Zakat", Jakarta, PT Mediantara Semesta, 2010, h.22-25.

⁵ Rahmi Fitriani, "Ayo Mengenal Zakat", h.74.

⁶ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No.1, 2015, h. 112-113.

⁷ Syarif Hidayatullah, "Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat", Jakarta, Al-Kautsar Prima Indocamp, 2018, h.27.

ini dapat disebut sebagai distribusi pendapatan. Dalam Islam pemerataan tidak hanya sekedar keadilan namun sejalan dengan kemaslahatan juga kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman. Pelaksanaan zakat profesi sebagai prinsip keadilan dalam distribusi ini disebabkan oleh upah atau gaji yang didapat karyawan, pegawai, dokter dan profesi lain berjumlah tinggi dan sesuai perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu.⁸ Terdapat 3 pendapat mengenai kewajiban dalam mengeluarkan zakat profesi, yaitu:

- a. Jika dengan profesinya seseorang mendapat penghasilan dan menjadi kaya (mempunyai kelebihan) maka zakat menjadi wajib baginya.
- b. Jika penghasilan tetap tidak mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga maka orang tersebut menjadi penerima zakat (*mustahiq*).
- c. Jika penghasilannya pas-pasan atau sekedar menutupi kebutuhan hidup maka orang tersebut tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan biaya lain baik untuk pendidikan atau untuk menjalankan profesinya.⁹

Begitu banyak jenis profesi yang dijalankan umat muslim saat ini diantaranya profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.¹⁰ Dalam agama Islam, setiap penghasilan yang diperoleh harus dikeluarkan zakatnya sesuai nishab dan haulnya yang merupakan zakat profesi. Untuk mensucikan penghasilan yang diperoleh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menurut syariat Islam, perlu dikeluarkan zakat profesi paling kurang 2,5% untuk penghasilan yang diperoleh PNS dan CPNS.¹¹ PNS di kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis berjumlah 66 orang dengan rincian sebagai berikut:¹²

⁸ Hertina, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Umat", Jurnal Hukum Islam, Vol.XIII, No. 1, 2013, h.27.

⁹ Hertina, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Umat", h.57-58.

¹⁰ Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Ayat (3).

¹¹ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Diktum Menimbang butir b dan c.

¹² Dasep Sanju Hidayat, divisi keuangan Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis, tanggal 01 Desember 2020, pukul 09.30 WIB.

No.	Satuan Kerja	Golongan				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1.	Tata Usaha	1	1	27	2	31
2.	Penyelenggara Haji dan Umroh			6		6
3.	Pendidikan Madrasah		1	4	2	7
4.	Pendidikan Agama Islam			4	1	5
5.	Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren			4	1	5
6.	Penyelenggara Syariah			2		2
7.	Bimbingan Masyarakat Islam	1	1	6	2	10
Total		2	3	53	8	66

Tabel 1. Jumlah PNS Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis

Berdasarkan tabel di atas, dari 66 PNS di kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis terdapat 2 PNS golongan I, 3 PNS golongan II, 53 PNS golongan III, dan 8 PNS golongan IV. Penghasilan / upah / gaji yang di dapat juga bervariasi sesuai golongan dan tingkatannya dari tingkat “a” sampai dengan tingkat “d”. Penghasilan PNS golongan I, II, dan sebagian golongan III tidak mencapai nishab zakat profesi sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat. Dalam pelaksanaannya, zakat dikeluarkan dari profesi PNS setiap bulan sebesar 2,5% terhadap semua golongan dari penghasilan kotor (penghasilan yang belum dikurangi apapun termasuk kebutuhan pokok muzaki) yang dibantu oleh pihak Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis.¹³

Majelis Ulama Indonesia turut mengatur zakat profesi yang dituangkan dalam Fatwa No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, di dalamnya dijelaskan bahwa

¹³ Agus Abdulloh, divisi Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis, tanggal 01 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.

semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun senilai 85 gram emas.¹⁴

Dalam al-Quran tidak disebutkan secara jelas mengenai nishab zakat profesi, namun dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Ali R. A. dengan matan rojih dan shahih nishab zakat profesi ini dapat dianalogikan dengan zakat emas sebab emas menjadi standar nilai mata uang dan itulah hasil yang didapat dari profesi. Hal ini berarti nishab zakat profesi sama dengan nishab zakat emas dan jumlah zakat dibayarkan setelah dikurangi biaya hidup. Disampaikan oleh ulama fiqih islam dan ahli tafsir, Ibnu Katsir menyatakan zakat profesi dihitung dan dibayar sesudah harta kepemilikan dipotong utang piutang juga biaya hidup dirinya dan keluarga, pendapat ini ditakwilkan berdasarkan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 219 dengan menukil pendapat dari Ibnu Abbas dalam memahami “yang lebih dari keperluan”.

Kemudian Profesor Adang Djumhur (guru besar hukum islam) berpendapat bahwa kadar zakat profesi dapat dihubungkan dengan rikaz sebesar 20%, dihubungkan dengan pertanian tanpa irigasi sebesar 10%, dihubungkan dengan pertanian dengan irigasi sebesar 5%, atau dihubungkan dengan emas dan perak sebesar 2,5%, serta tergantung keikhlasan *muzaki* dalam penghitungannya apakah dipotong utang piutang dan kebutuhan hidup serta tanggungannya terlebih dahulu atau dihitung dari pendapatan utuh / kotor. Adapun pendapat Amin Rais tentang kadar zakat berlaku azas lebih banyak lebih baik, mengeluarkan zakat 20% lebih baik dari 10%, 10% lebih baik dari 5%, 5% lebih baik dari 2,5%, dan 2,5% lebih baik daripada tidak sama sekali.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, penghasilan PNS yang dikenakan zakat profesi di kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis tidak memperhatikan ketentuan nishab dan haul sebagaimana ketentuan dalam Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai penentuan nishab pada zakat profesi PNS menurut

¹⁴ Fuad Riyadi, “*Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*”, h.120.

¹⁵ Yani Rohmayani, “*Zakat Profesi dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat*”, h.28-29.

Fatwa No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan di kalangan pegawai kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis, mulai dari mekanisme penentuan nishab zakat profesi dan bagaimana pelaksanaan penentuan nishab zakat profesi tersebut ditinjau menurut fatwa yang penulis angkat ke dalam sebuah judul ***“Pelaksanaan Penentuan Nishab Zakat Profesi PNS Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 (Studi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis)”***.

B. Rumusan Masalah

Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang harus dikeluarkan dari harta orang kaya (secara materi) untuk membantu sesama umat muslim yang perekonomiannya sulit, dan salah satu macam zakat adalah zakat profesi. Besar nishab zakat profesi yang diatur ketentuannya dalam fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan adalah sebesar 85 gram emas dengan kadar 2,5% dan telah mencapai haul. Namun zakat yang diambil dari profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis ditarik setiap bulan sebesar 2,5% terhadap semua golongan PNS, padahal banyak penghasilan PNS yang belum mencapai nishab diantaranya PNS golongan I, II, dan sebagian golongan III. Hal ini berbeda dengan ketentuan zakat profesi yang terdapat dalam fatwa tersebut. Dengan begitu, penulis merasa perlu mengetahui lebih dalam penentuan nishab zakat profesi PNS dengan membuat pertanyaan penelitian agar lebih terarah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penentuan nishab zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis?
2. Bagaimana pelaksanaan penentuan nishab zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis ditinjau menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penentuan nishab zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penentuan nishab zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis ditinjau menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun melalui penelitian ini penulis berharap hasilnya dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya yang berhubungan dengan zakat profesi PNS mengenai penentuan nishabnya yang ditinjau menurut Fatwa No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah yang sedang mencari sumber rujukan di bidang yang sama, serta menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi praktik zakat profesi terhadap PNS bagi Instansi yang bersangkutan yakni Kementerian Agama Kab. Ciamis.

E. Studi Terdahulu

Sebelumnya penulis telah melakukan penelitian studi terdahulu untuk mengetahui apa saja yang sudah diteliti serta mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada melalui beberapa studi terdahulu ini. Dengan demikian penulis meneliti skripsi dan jurnal yang disusun oleh:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Taupik Rahmat Azhar dalam skripsinya yang berjudul “*Implementasi UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Jakarta Utara*”. Dalam skripsi tersebut peneliti membahas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jakarta Utara yang digambarkan dengan pengumpulan dan pendayagunaan zakatnya, faktor penghambat restrukturisasi BAZNAS Kota Jakarta Utara, dan pengimplementasian UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 43 Ayat 2 di BAZNAS Kota Jakarta Utara yang ternyata belum sesuai aturan. Sedangkan penulis meneliti

bagaimana mekanisme penentuan nishab zakat profesi di BAZNAS Kab. Ciamis serta tinjauannya menurut Fatwa No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Faa Izah dalam skripsinya yang berjudul “*Peraturan Penghimpunan Zakat Profesi di Indonesia dan Implementasinya Pada Instansi Pendidikan Kota Jambi*”. Dalam skripsi tersebut peneliti membahas peraturan – peraturan yang mengatur penghimpunan zakat profesi yang belum maksimal penerapannya terutama dalam pembentukan UPZ, penentuan nishab zakat profesi di BAZNAS Kota Jambi yang belum sesuai peraturan BAZNAS juga fatwa, dan pelaksanaan zakat profesi yang dijadikan pengurang pajak penghasilan di instansi pendidikan kota jambi. Sedangkan fokus penelitian penulis mengenai bagaimana mekanisme penentuan nishab zakat profesi di BAZNAS Kab. Ciamis serta tinjauannya menurut Fatwa No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Pratama dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Nishab Zakat Penghasilan Dalam PERDA Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah*”. Dalam skripsi tersebut peneliti membahas penentuan nishab zakat penghasilan menurut PERDA Kab. Garut No. 6 Tahun 2014, penentuan nishab zakat penghasilan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan harmonisasi kedua peraturan tersebut yakni antara PERDA Kab. Garut No. 6 Tahun 2014 dengan KHES mengenai penentuan nishab zakat penghasilan. Sedangkan fokus penelitian penulis mengenai bagaimana mekanisme penentuan nishab zakat profesi di BAZNAS Kab. Ciamis serta tinjauannya menurut Fatwa No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adiguna Bimasakti dalam sebuah jurnal yang berjudul “*Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf Qardhawy*”. Dalam jurnal tersebut peneliti membahas dasar pengambilan hukum dan penghukuman terhadap zakat penghasilan yang digunakan dan diambil dalam Fatwa No. 3 tahun 2003 apakah sama dengan ijtihad Yusuf Qardhawy, dan pengenaan zakat penghasilannya apakah sudah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sedangkan fokus penelitian penulis

mengenai bagaimana mekanisme penentuan nishab zakat profesi di BAZNAS Kab. Ciamis serta tinjauannya menurut Fatwa No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abror dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di BAZDA Rembang*”. Dalam skripsi tersebut peneliti membahas praktik zakat profesi di BAZDA Rembang, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat profesi tersebut. Sedangkan fokus penelitian penulis mengenai bagaimana mekanisme penentuan nishab zakat profesi di BAZNAS Kab. Ciamis serta tinjauannya menurut Fatwa No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Berikut adalah studi terdahulu yang disajikan ke dalam bentuk tabel di bawah ini:

No .	Penulis	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Taupik Rahmat Azhar	Implementasi UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Jakarta Utara	Pendekatan yuridis, jenis penelitian kualitatif.	Pelaksanaan pengelolaan zakat dilakukan melalui Kerjasama dengan aparat pemerintah mulai dari tingkat kota sampai kelurahan, BAZNAS kota Jakarta Utara menunjuk petugas operasional ZIS, dan pendayagunaan direalisasi	Sama sama membahas mengenai zakat.	Penelitian tersebut membahas zakat secara umum yang ditinjau menurut UU, sedangkan penelitian penulis membahas zakat profesi PNS yang ditinjau menurut Fatwa MUI.

				kan ke dalam 5 program.		
2.	Faa Izah	Peraturan Penghimpunan Zakat Profesi di Indonesia dan Implementasinya Pada Instansi Pendidikan Kota Jambi.	Penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan <i>statute approach</i> .	Penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kota Jambi belum sesuai dengan peraturan mengenai zakat profesi yang berlaku di Indonesia.	Membahas mengenai zakat profesi.	Penelitian tersebut membahas implementasi semua peraturan zakat profesi di instansi pendidikan, sedangkan penelitian penulis membahas zakat profesi PNS ditinjau dari Fatwa MUI saja di Kemenag Kab. Ciamis.
3.	Ihsan Pratama	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Nishab Zakat Penghasilan dalam PERDA Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat,	Deskriptif analitis.	PERDA Kab. Garut No.6 Tahun 2014 Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa zakat penghasilan dihitung dari penghasilan kotor, sedangkan dalam KHES zakat penghasilan dihitung dari	Membahas mengenai ketentuan nishab zakat profesi.	Penelitian tersebut meninjau zakat profesi dari KHES terhadap PERDA Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik yakni zakat profesi PNS dan ditinjau

		Infaq, Shadaqah.		penghasilan bersih.		dari Fatwa MUI.
4.	Muhammad Adiguna Bimaski	Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf Qardhawi.	Studi komparatif antara Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 dengan Ijtihad Yusuf Qardhawi.	Ketentuan nishab dan haul dalam Fatwa tidak jelas dan tidak mengikuti tuntunan kaidah hadits mengenai haul, dan Yusuf Qardhawi mengantisipasi hal tersebut dengan memisahkan antara harta yang dikonsumsi sehari-hari dengan harta zakat.	Membahas mengenai zakat profesi dalam Fatwa MUI.	Penelitian tersebut membandingkan ketentuan zakat profesi dalam Fatwa MUI dengan Ijtihad Yusuf Qardhawi, sedangkan penelitian penulis membahas zakat profesi PNS dan hanya meninjau pelaksanaan ketentuan nishabnya menurut Fatwa MUI.
5.	Muhammad Abror	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di BAZDA Rembang.	Deskriptif analitis dengan pendekatan normatif.	BAZDA Rembang menjadikan ijtihad Yusuf Qardhawi sebagai rujukan utama hukum fikihnya, namun praktiknya di lapangan justru tidak	Membahas mengenai praktik zakat profesi.	Penelitian tersebut meninjau zakat profesi dari Hukum Islam dan dilakukan di BAZDA, sedangkan penelitian penulis zakat profesinya ditinjau dari Fatwa MUI dan

				menjalankan rujukan tersebut dan tidak sesuai hukum Islam.		dilaksanakan di Kementerian Agama.
--	--	--	--	--	--	------------------------------------

Tabel 2. *Studi Terdahulu*

F. Kerangka Berpikir

Juhaya S. Praja dalam buku karyanya yang berjudul *Filsafat Hukum Islam* mengemukakan teori yang dinamai teori kredo (teori syahadat), adalah sebuah teori yang menyatakan keharusan dalam melaksanakan hukum islam bagi mereka yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi dari pengikrarnya itu. Sesungguhnya teori ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Swt. maka ia harus taat atas apa yang menjadi perintah Allah, Rasulullah Saw. dan sunnahnya. Intinya, maksud dari teori ini adalah setiap muslim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hukum islam secara menyeluruh sebagai konsekuensi dari syahadatnya.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka zakat yang termasuk pada rukun islam juga dihukumi sebagai perintah Allah yang wajib untuk dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu.

Membicarakan zakat sama dengan membicarakan hubungan sesama manusia yang diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda, ada yang kaya ada juga yang miskin. Keduanya saling membutuhkan dan hal ini berarti terdapat hubungan timbal balik yang tidak bisa dihindari, sebab fungsi zakat salah satunya adalah merajut hubungan kedua golongan tersebut guna memiliki kehidupan yang harmonis. Bahasan zakat ini apabila ditinjau dari lafadznya disebutkan sebanyak 26 kali dalam Al-Quran yang disandingkan dengan shalat dalam satu ayat, dan 6 kali disebutkan secara terpisah dengan shalat, maka jumlah kata zakat dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 32 kali.

¹⁶ M. Mas'ud, dkk., "Eksistensi Teori Kredo dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Islamika: Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya*, Vol. 14, No. 1, 2020, h.56.

Berikut adalah kata zakat yang disandingkan dengan kata shalat dalam satu ayat:

No.	Nomor Surah	Nama Surah	Nomor Ayat
1.	2	Al-Baqarah	43
2.	2	Al-Baqarah	83
3.	2	Al-Baqarah	110
4.	2	Al-Baqarah	177
5.	2	Al-Baqarah	277
6.	4	An-Nisa	77
7.	4	An-Nisa	162
8.	5	Al-Maidah	12
9.	5	Al-Maidah	55
10.	9	At-Taubah	5
11.	9	At-Taubah	11
12.	9	At-Taubah	18
13.	9	At-Taubah	71
14.	19	Maryam	31
15.	19	Maryam	55
16.	21	Al-Anbiya	73
17.	22	Al-Hajj	41
18.	22	Al-Hajj	78
19.	24	An-Nur	37
20.	24	An-Nur	56
21.	27	An-Naml	3
22.	31	Lugman	4
23.	33	Al-Ahzab	33
24.	58	Al-Mujadilah	13
25.	73	Al-Muzammil	20
26.	98	Al-Bayyinah	5

Tabel 3. Ayat Zakat dengan Shalat dalam Al-Quran

Salah satu ayat tentang zakat yang disandingkan dengan shalat dalam satu ayat yaitu Q.S At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۚ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

Berikut adalah kata zakat yang terpisah dengan kata shalat:

No.	Nomor Surah	Nama Surah	Nomor Ayat
1.	7	Al-A'raf	156
2.	18	Al-Kahfi	81

3.	19	Maryam	13
4.	23	Al-Mu'minun	4
5.	30	Ar-Rum	39
6.	41	Fushshillat	7

Tabel 4. Ayat Zakat Terpisah dengan Shalat dalam Al-Quran

Salah satu ayat tentang zakat yang terpisah dengan shalat dalam ayat yang berbeda yaitu Q.S Fussilat ayat 7¹⁷:

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.

Ciri utama seorang mukmin ialah membayar zakat, sedangkan ciri seorang yang musyrik ialah tidak melaksanakan perintah Allah untuk membayar zakat, hingga Allah mengancam dan menerangkan ciri-ciri daripada mereka yang tidak membayar zakat. Oleh sebab itu, menunaikan zakat hukumnya adalah wajib dan menjadi sifat seorang mukmin.¹⁸

Selain Al-Quran yang banyak membahas tentang zakat, terdapat pula beberapa hadits Nabi Saw. yang membahas tentang zakat, diantaranya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Musa] dia berkata, telah mengabarkan kepada kami [Hanzhalah bin Abu Sufyan] dari [Ikrimah bin Khalid] dari [Ibnu Umar] berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari).

¹⁷ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, "Fikih Zakat Kontekstual Indonesia", Jakarta Pusat, BAZNAS, 2018, h.10.

¹⁸ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, "Fikih Zakat Kontekstual Indonesia", h.22.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad] dari [Zakariya' bin Ishaq] dari [Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy] dari [Abu Ma'bad] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka. (HR. Bukhari).

Hadits-hadits tersebut memperkuat sekaligus memperjelas kewajiban zakat yang sudah di atur dalam Al-Quran tentang wajibnya zakat. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, hadits pun memerintahkannya pula dan umat Islam harus menjalankan perintah hadits tersebut sebagaimana menjalankan perintah Al-Quran.¹⁹

Pandangan empat madzhab terkait menyegerakan atau menunda zakat adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, “*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*”, h.36.

²⁰ Gus Arifin, “*Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah (Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Madzhab)*”, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2011, h.49.

1. Menurut madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali bahwa menyegerakan zakat sebelum haul adalah boleh. Sedangkan menurut madzhab Maliki menyegerakan zakat sebelum haul adalah tidak boleh.
 2. Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan madzhab Syafi'i menunda pembayaran zakat adalah tidak boleh. Sedangkan menurut madzhab Hanbali apabila seseorang mampu membayar zakat bukan karena syarat zakat, maka seseorang tersebut tetap wajib membayarnya meskipun telah rusak jika mencapai haul.
- Adapun kaidah fikih yang dapat diterapkan dalam persoalan zakat adalah:²¹

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa segala kebijakan pemimpin (seorang imam) terhadap orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya itu, mengacu pada terwujudnya maslahat (manfaat) dalam kebijakannya, baik yang diraihinya itu berupa manfaat duniawi atau manfaat ukhrawi, atau kerusakan dan bahaya yang terhindarkan dari orang-orang di bawah kepemimpinannya.

Penerapan kaidah fikih tersebut salah satunya seperti apa yang disebutkan al-Suyuthi dalam *al-Asybah wa al-Nadhair*, yaitu ketika seorang pemimpin yang membagikan harta zakat kepada delapan golongan (ashnaf) sebagai golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, maka pemimpin itu tidak boleh mengutamakan salah satu kelompok ketika kebutuhan dari mereka itu sama. Selain itu, penerapan kaidah tersebut juga dapat dilihat ketika Rasulullah, para sahabatnya, dan pemimpin muslim lainnya melakukan pengutusan para pengambil harta zakat.²²

Indonesia sebagai negara yang mempunyai pemerintahan yang sah, pemerintah mempunyai wewenang membuat undang-undang yang dimaksudkan mencapai kemaslahatan seluruh warga negaranya, mengingat sudah menjadi kewajiban pemimpin untuk memenuhi kemaslahatan rakyat sebagai amanah yang ia terima

²¹ Ahmad Rifai, "Implikasi Kaidah Fikih تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3, No. 6, 2015, h. 297.

²² Ahmad Rifai, "Implikasi Kaidah Fikih تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia", h. 301.

dari rakyat. Hal ini dalam persoalan sosial dan kesejahteraan rakyat mempunyai keterkaitan dengan persoalan pengelolaan zakat dalam agama Islam. Persoalan ini ditempuh pemerintah dengan membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.²³

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa zakat yaitu menunaikan hak yang hukumnya wajib atas suatu harta. Kemudian profesi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan pada suatu bidang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu yang mencakup kejujuran, keterampilan, dan lainnya. Maka zakat profesi memiliki pengertian sebagai zakat yang dikeluarkan dari apa yang dihasilkan oleh profesi atau pekerjaannya itu. Baik yang dikerjakan sendiri maupun yang dikerjakan dengan pihak lain (dengan perorangan, perusahaan, pemerintah) berkat keterampilan tangan, otak, atau keduanya hingga mendapatkan penghasilan berupa upah, gaji, atau honor. Jika penghasilan tersebut mencapai nishab dan haul barulah dikeluarkan zakatnya.²⁴ Adapun profesi itu sendiri banyak sekali macamnya seperti dokter, jurnalis, artis, karyawan, notaris, Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara), dan lainnya. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.²⁵

Zakat profesi merupakan jenis zakat yang relatif baru hingga wajar saja bila tidak dijumpai secara jelas ketentuan hukumnya dalam Quran maupun Sunnah. Oleh sebab itu, persoalan ini dapat dikembalikan pada Quran dan Sunnah itu sendiri dengan memperluas makna lafadz dan juga qiyas (analogi). Berdasarkan keumuman makna zakat terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267:

²³ Ahmad Rifai, “*Implikasi Kaidah Fikih عَلَى الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْقُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, h. 303.

²⁴ Agus Maritim dan Tira Nur Fitria, “*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.1, No.1, 2015, h.51.

²⁵ Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Ayat (2) dan (3).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat di atas mengandung pengertian umum bahwa apa saja hasil usaha manusia yang didapat secara baik dan halal, mencakup pula seluruh pemberian yang telah Allah keluarkan dari bumi untuk manusia terkena wajib zakat. Penggunaan kata “*maa*” pada ayat ini melegitimasi semua jenis profesi atau usaha yang kemudian mendatangkan penghasilan harus dikeluarkan zakatnya, asal penghasilan yang didapat itu melebihi kebutuhan pokok hidup muzaki beserta yang menjadi tanggungannya, terbebas dari utang, melewati haul dan telah mencapai nishab.²⁶

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.²⁷ Adapun dalam definisi yang lain nishab merupakan suatu batas minimal (terendah) atau ukuran yang telah ditentukan Islam sebagai pedoman dalam mengeluarkan harta miliknya untuk zakat jika sudah mencapai batas tersebut. Dengan begitu, mereka yang hartanya sudah mencapai atau melebihi nishab wajib mengeluarkan zakat, dengan syarat:

1. Harta yang dizakati diluar dari kebutuhan yang mesti dipenuhi misalnya makanan, tempat tinggal, pakaian, kendaraan dan alat yang digunakan mata pencaharian.
2. Harta yang dizakati berjalan satu tahun dengan kata lain mencapai haul yang terhitung mulai sejak hari kepemilikan nishab. Syarat ini dikecualikan pada

²⁶ Agus Maritim dan Tira Nur Fitria, “*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*”, h.54-56.

²⁷ PERDA Kab. Ciamis Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 22.

zakat pertanian, sebab pada zakat pertanian zakatnya diambil saat panen, demikian pula dengan zakat rikaz (harta karun/harta temuan) yang diambil saat menemukan. Sedangkan syarat ini berlaku pada zakat emas, perak, binatang ternak, harta simpanan, dan harta perniagaan.

Dari Ali *radhiallahu 'anhu*, dia berkata:

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: “Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu haul (satu tahun)” [HR. Ahmad: 1265; Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf: 7023; Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf: 10214; ad-Daruquthniy: 1892. Sanadnya dinilai shahih oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam ta’liq beliau terhadap al-Musnad, 2: 311].²⁸

Adapun kaidah fiqih yang tepat dengan persoalan zakat profesi ini yaitu:²⁹

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْاجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: “Keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan pada persoalan ijtihad”.

Majlis Ulama Indonesia merupakan sebuah lembaga yang bertugas memberi fatwa dan dikeluarkan oleh komisi fatwa atas persoalan kebutuhan publik. MUI sebagai pengakomodir organisasi sosial seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, oleh sebab itu fatwa memiliki pengaruh yang luas. Komisi fatwa MUI dalam menetapkan fatwa didasarkan pada Quran, Hadits, Ijma serta qiyas mengingat kesepakatan mayoritas ulama menjadikannya sebagai sumber hukum.³⁰

MUI memandang perlu menetapkan Fatwa No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang membahas mengenai status hukum zakat penghasilan untuk kemudian digunakan sebagai pedoman bagi umat muslim juga pihak yang merasa

²⁸ Inilahcom, “Syarat-Syarat Nishab Zakat Harta”, diakses melalui <https://inilah.com/mozaik/2461925/syarat-syarat-nishab-zakat-harta>, pada tanggal 8 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB.

²⁹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, “Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi/Penghasilan”, diakses melalui <https://puskasbaznas.com/publications/officialnews/425-ketentuan-dan-tata-cara-penghitungan-zakat-profesi-penghasilan>, pada tanggal 11 Juni 2021, Pukul 10.30 WIB.

³⁰ Jamal Ma'mur, “Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (Tafliq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)”, Jurnal Wahana Akademika, Vol. 5, No. 2, 2018, h.45

perlu. Hal ini dikarenakan kedudukan hukum zakat penghasilan/profesi baik yang penghasilannya rutin seperti gaji karyawan/pegawai dan pejabat atau yang penghasilannya tidak rutin seperti dokter, penceramah, konsultan, pengacara dan sejenisnya, atau juga yang penghasilannya didapatkan dari pekerjaan bebas lainnya yang sering menjadi pertanyaan umat muslim di Indonesia.

Dalam Fatwa No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan menetapkan bahwa semua bentuk penghasilan halal hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun senilai 85gr emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%, dan waktu pengeluaran zakatnya bahwa: Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab; dan Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.³¹

Terdapat perbedaan perlakuan dalam pengeluaran objek zakat penghasilan yang diterima, yakni apakah diambil zakatnya langsung atau dikurangi keperluan pembayar zakat terlebih dahulu. Dibagi pada tiga pendapat:

1. Mengeluarkan zakat sebelum dikurangi apa pun pada saat menerima dari penghasilan yang telah mencapai nishab 85gr emas dalam satu tahun dengan kadar zakat 2,5% disebut **pendapatan kotor (brutto)**. Az-Zuhri dan 'Auza'i berpendapat bahwa "Bila seseorang mendapat penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya" (Ibnu Abi Syaibah, Al-mushannif, 4/30). Kemudian mengqiyaskan pada harta zakat lain seperti zakat emas, perak, rikaz, ma'dan, dan ternak dikeluarkan secara langsung tanpa pengurangan apa pun.
2. Mengeluarkan zakat dari penghasilan yang diterima sesudah dikurangi kebutuhan pokok untuk dirinya, keluarganya, juga tanggungannya, dan membayar utang, disebut **pendapatan bersih (netto)**. Jika masih mencapai nishab 85gr emas dalam satu tahun maka zakat hukumnya wajib, dan

³¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 20013 Tentang Zakat Penghasilan.

sebaliknya. Pendapat tersebut berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah bersabda “... dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kebutuhan...” (Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, 486).

3. Mengeluarkan zakat dari penghasilan yang sudah dikurangi biaya operasional kerja mencakup ongkos transportasi, biaya alat kerja, kebutuhan sehari-hari di tempat kerja, dan lainnya disebut **pendapatan minus biaya operasional**. Jika kemudian mencapai nishab 85gr emas dalam satu tahun maka hukumnya wajib zakat. Pendapat ini berdasarkan pengqiyasan dengan zakat kurma, hasil bumi, atau sejenisnya. Pendekatan tersebut didukung ulama seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali Al Saqqa (1917-1996 M) yang menyamakan pertanian dan perkebunan dengan jasa profesi karena keduanya hanya memperhitungkan keuntungan bukan memperhitungkan modal.³²

Adapun pendapat ulama yang mengindikasikan wajibnya zakat profesi adalah sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm mengemukakan bahwa sah riwayat yang disampaikan Ibnu Abbas yang mewajibkan zakat pada setiap harta yang wajib dizakati pada waktu dimiliki seorang muslim. (*Al-Muhalla*, VI: 83).
2. Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz selalu mengeluarkan zakat dari *al-‘atha* (gaji) dan *al-ja’izah* (honorarium). Bahkan beliau memungut zakat atas honor dan hadiah yang diberikan kepada delegasi sebagai imbalan atas prestasi maupun atas jasa.
3. Ulama Tabi’in seperti Al-Hasan, Az-Zuhri, Al-Auza’i dan Ma’khul juga berpendapat bahwa wajib hukumnya mengeluarkan zakat atas pendapatan.
4. Madzhab Ja’fari seperti Ash-Shadiq, An-Nashir, dan Al-Baqir sependapat dengan Daud Ad-Dzhahiri bahwa orang yang menerima gaji kemudian mencapai nishab, makai ia harus mengeluarkan zakatnya pada saat itu tanpa menunggu haul. (*Fiqh Az-Zakat*, I/502-503).

³² Gus Arifin, “*Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*”, Jakarta, Elex Media Komputindo, h.133-134.

5. Riwayat dari Imam Ahmad bahwa barang siapa yang menyewakan tanah atau rumah dan harganya mencapai nishab, maka harus mengeluarkan zakat atasnya pada waktu itu. (Al-Mughni-Ibn Qudamah, II/683).
6. Ulama Syafi'iyah, Asy-Syirazi menyampaikan bahwa orang yang mendapatkan uang sewa dari sebuah rumah serta telah melalui haul maka wajib mengeluarkan zakat meskipun penyewa belum memanfaatkan rumah tersebut hingga habis masa kontrak. Sebab uang sewa tersebut sudah menjadi milik pihak yang menyewakan secara penuh, hal ini sama seperti uang mahar bagi seorang Wanita. (Al-Thab'ah al-Kamilah min Kitab Al-Majmu'-5/508-509). Kemudian menurutnya bahwa:

“Setiap pendapatan yang diterima oleh seorang muslim, baik berupa uang hasil sewaan rumah atau uang mahar apabila mencapai nishab dan haul, maka wajib dibayar zakatnya.”

Hal ini dapat dianalogikan dengan hasil dari profesi yang keduanya sama-sama menawarkan pelayanan dan jasa.
7. Ulama masa kini seperti Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf Qardhawy, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdurrahman bin Hasan telah melakukan penelitian secara komprehensif terhadap argumen-argumen pro dan kontra atas wajibnya zakat profesi dengan kesimpulan bahwa mereka lebih memilih pendapat yang mewajibkan zakat profesi.³³

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis, yang dijelaskan Sugiyono (2017) sebagai metode untuk mendeskripsikan (memberi gambaran) atas objek penelitian baik melalui data maupun sampel yang sudah terkumpul tanpa menganalisis dan

³³ Gus Arifin, “*Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah (Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Madzhab)*”, h.133.

menyimpulkan untuk umum.³⁴ Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, yakni proses pemahaman atau penelitian berdasarkan metodologi yang menyelidiki masalah manusia juga fenomena sosial. Menurut Creswell (1998) penelitian kualitatif merupakan suatu gambaran yang kompleks dalam meneliti laporan dari pandangan responden, kata-kata, dan situasi yang dialami.³⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif, yakni penelitiannya dilakukan dengan tidak menggunakan statistik melainkan pengumpulan data, menganalisis, selanjutnya diinterpretasikan dan penulisannya berisikan kutipan fakta yang didapat di lapangan guna memberi dukungan atas apa yang disajikan dalam penelitian. Daripada angka, fakta dan data dihimpun ke dalam bentuk kata maupun gambar.³⁶ Tentunya fakta dan data tersebut berhubungan dengan pelaksanaan penentuan nishab zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis mengenai:

- a. Mekanisme penentuan nishab zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis.
- b. Tinjauan Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan terhadap penentuan nishab zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis.

3. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai berikut³⁷:

³⁴ Siti Faridah, "Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono", diakses melalui <https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, pada tanggal 5 Desember 2020, Pukul 12.30 WIB.

³⁵ Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)", Jakarta, Kencana, Cet. Ke-7 2017, h.33.

³⁶ Albi Anggito & Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Sukabumi, CV Jejak, 2018, h.9 dan 11.

³⁷ Didin Fatihudin, "Metode Penelitian untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi", Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2015, h.116.

- a. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek penelitian, sumbernya di lapangan yakni narasumber dari Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis, kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah sendiri.
- b. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dengan kata lain dalam bentuk yang sudah jadi seperti buku-buku zakat dengan berbagai macam konsentrasinya, skripsi, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara, diartikan oleh Nazir (1999) sebagai proses mendapatkan keterangan secara tatap muka dengan melakukan tanya jawab antara penanya dengan penjawab menggunakan suatu alat yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*) untuk tujuan penelitian.³⁸ Maka penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan beberapa narasumber diantaranya divisi Penyelenggara Syariah, divisi Keuangan, divisi Kepegawaian, Ketua UPZ dari Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis, dan Sekretaris BAZNAS sebagai narasumber terkait masalah yang diteliti.
- b. Dokumentasi, diartikan sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat data yang sudah ada dan diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen ini dapat berbentuk gambar, tulisan, maupun karya-karya milik seseorang.³⁹
- c. Kepustakaan, yakni penulis mengkaji literatur yang tersedia untuk digunakan sebagai bahan penunjang dan tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil bacaan dari literatur tersebut baik jurnal, buku atau lainnya, akan memberi gambaran dan memperjelas

³⁸ Hardani dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu, 2020, h.137.

³⁹ Hardani dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, h. 149.

bagaimana suatu topik itu dimengerti dan dibahas oleh peneliti atau penulis sebelumnya.⁴⁰

5. Analisis Data

Langkah-langkah penulis dalam menganalisis data yang sudah terkumpul pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data juga informasi baik dari sumber primer maupun sekunder.
- b. Mengklasifikasikan mana data yang dibutuhkan terkait masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data-data yang diperoleh dengan ketentuan fatwa dan syariah sesuai masalah penelitian.
- d. Menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah.
- e. Menyimpulkan data yang telah dianalisis sesuai rumusan masalah.



⁴⁰ J.R. Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*”, Jakarta, PT. Grasindo, Cet. Ke-1 2010, h.18.